

OTONOMI KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI DAN RANKING UNIVERSITAS: STUDI DI INDONESIA

Rumiyati¹, Faiz Zamzami², Arin Pranesti³, Frida Fanani Rohma⁴

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: ¹rumi_yati@ugm.ac.id

Email: ²faiz@ugm.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: ³arinpranesti@uny.ac.id

⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

Email: ⁴frida.frohma@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Institusi pendidikan tinggi mendapatkan manfaat yang besar dari ranking universitas (Hemsley-Brown et.al., 2016). Efek dari ranking universitas membantu universitas menarik mahasiswa terbaik dan pendanaan penelitian (Wilkins dan Huisman 2012). Sedangkan penentuan ranking universitas di tingkat internasional memiliki bermacam-macam kriteria penilaian, salah satunya adalah jumlah publikasi riset yang terindeks Scopus. Saat ini Pemerintah Indonesia memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada institusi pendidikan tinggi. Apakah otonomi tersebut memiliki peran untuk meningkatkan ranking universitas melalui peningkatan jumlah riset yang terindeks Scopus? Penelitian ini menggunakan data dari 5 (lima) universitas negeri berbadan hukum, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, dan Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan otonomi keuangan universitas berpengaruh positif terhadap ranking pada level 1% dan pengeluaran penelitian terhadap ranking universitas pada level 5%. Pengeluaran penelitian memediasi penuh (full mediating) hubungan antara otonomi keuangan universitas terhadap ranking universitas.

Kata kunci: otonomi keuangan, penelitian, scopus, ranking universitas

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk keberhasilan pengelolaan institusi pendidikan adalah adanya pengakuan dari pihak luar baik berupa akreditasi perguruan tinggi (universitas) maupun ranking universitas secara nasional maupun internasional (Jöns dan Hoyler 2013; Daraio et.al. 2015; Millot 2015). Secara tidak langsung, *branding university* menjadi pemicu bagi universitas untuk berkompetisi dengan universitas lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan secara global (Hemsley-Brown et. al., 2016). Tren tersebut juga berlaku di pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Menjadi universitas

yang diakui secara internasional yang tergambarkan dalam ranking dalam *World University Ranking* merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai salah satu *benchmark* perguruan tinggi di Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dimulai dari penyaringan input, pengendalian proses hingga evaluasi output pendidikan. Peningkatan atau perankingan universitas secara internasional menjadi lebih eksklusif karena melibatkan berbagai aspek penilaian dan juga kompetisi dengan universitas di seluruh dunia.

Sektor pendidikan tinggi mendapatkan banyak manfaat dari keberhasilan *branding* universitas dalam bentuk peneringkatan

universitas (Hemsley-Brown *et.al.* 2016). Ranking memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan universitas menarik akademisi terbaik, mahasiswa terbaik, dan pendanaan riset (Wilkins dan Huisman 2012). Terdapat beberapa kriteria penilaian ranking universitas secara internasional bagi perguruan tinggi yaitu diantaranya adalah reputasi akademik, jumlah spesialis asing, jumlah mahasiswa asing, proporsi dosen dan mahasiswa, serta indeks sitasi. Salah satu hal yang penting di dalam kriteria penilaian *World University Ranking* adalah jumlah riset yang terpublikasi dan artikel yang tersitasi.

Peningkatan kualitas output pendidikan yang dinilai dalam kriteria penilaian *World University Ranking* mensyaratkan perlunya upaya yang lebih besar dari universitas baik dari segi pendanaan dan peningkatan sumber daya manusia.

Sistem pendidikan tinggi yang ada di Indonesia terkena dampak pada ketidakefisienan internal dan rendahnya inisiatif yang disebabkan oleh sistem pendidikan yang tersentralisasi yaitu ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Selanjutnya, hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa masalah yang ada di tingkat perguruan tinggi di Indonesia yaitu berkaitan dengan akses dan kesetaraan pendidikan, akreditasi, jaminan kualitas, dan jumlah penelitian (Wicaksono dan Friawan 2011). Universitas negeri tidak dapat berfokus pada peringkat universitas global dikarenakan masalah institusi yang meliputi dukungan pendanaan, infrastruktur penelitian, kecakapan meneliti, dan penekanan pengajaran (Reddy *et. al.*, 2016).

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan mendukung adanya peningkatan pengelolaan dana di institusi pendidikan dengan memperbolehkan universitas dapat berbentuk berbadan hukum. Wicaksono dan Friawan (2011) menyampaikan bahwa semenjak terdapat reformasi menjadi universitas berbadan hukum, universitas tidak lagi menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan sehingga konsekuensinya adalah harus melakukan pertanggungjawaban kepada publik. Hal tersebut dikarenakan pendanaan pengelolaan pendidikan tidak sepenuhnya mengandalkan aliran dana dari pemerintah pusat namun sesuai dengan kreativitas masing-masing universitas untuk melakukan pemerolehan dana.

Seperti halnya reformasi di Amerika, universitas di Indonesia akan diberikan hibah oleh pemerintah yang didasarkan pada kinerja universitas. Jika didasarkan pada teori pensinyalan yang telah banyak diaplikasikan di sektor swasta, maka antar-universitas akan saling berkompetisi untuk berkinerja sebaik mungkin guna memberikan sinyal kepada pihak luar perguruan tinggi. Hal tersebut ditujukan agar para pemangku kepentingan memberikan insentif berupa penambahan anggaran pendidikan baik berupa hibah maupun insentif untuk peningkatan fasilitas pendidikan.

Dengan demikian, universitas yang memiliki otonomi keuangan jauh memiliki keleluasan dalam segi pendanaan akibat ketertarikan pihak luar atas kinerja universitas otonom. Hal tersebut akan memengaruhi perolehan dana tambahan dari luar anggaran pemerintah bagi universitas otonom, sehingga akan memiliki sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan universitas yang hanya mengandalkan anggaran pendidikan yang ditetapkan dari pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas pengelolaan universitas dalam mendorong pencapaian peringkat universitas pada skala internasional. Sebagian besar penelitian umumnya mengkaji mengenai peringkat dengan kinerja universitas (Daraio, Bonaccorsi, dan Simar 2015), tingkat dampak penelitian di suatu universitas dan peringkat dunia (Reddy *et. al.*, 2016) dan masih terbatas penelitian yang mengkaji mengenai hubungan jenis universitas terhadap peringkat universitas secara internasional. Dengan demikian, diperlukan investigasi lanjut untuk mengetahui apakah keberadaan universitas otonom mampu mendorong peningkatan peringkat universitas di tingkat global. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak seperti di sektor perusahaan, di bidang institusi pendidikan belum terdapat penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengelolaan dana secara *partially* independen (otonom) dengan pemeringkatan universitas

Penelitian ini membatasi pada universitas yang menjadi *top ten universities* yang memiliki publikasi *Scopus tertinggi* di Indonesia berdasar Sinta Ristekdikti dan universitas yang memiliki otonomi keuangan. Otonomi keuangan dapat

diartikan untuk universitas berbadan hukum maupun badan layanan umum karena memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Otonomi keuangan yang diberikan pemerintah kepada universitas dimungkinkan adanya kenaikan kinerja/produktifitas dalam pencapaian tujuan perguruan tinggi, tridharma universitas. Apakah otonomi keuangan yang diberikan oleh pemerintah berhubungan dengan besarnya proporsi beban penelitian yang dikeluarkan universitas. Apakah pengeluaran investasi penelitian dapat memediasi hubungan otonomi keuangan universitas dalam meraih *world class university ranking*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi keuangan universitas berpengaruh positif terhadap ranking universitas dan pengeluaran penelitian universitas dapat memediasi hubungan tersebut. Bagian utama artikel ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama membahas pendahuluan, bagian kedua adalah metode penelitian, bagian ketiga adalah analisis dan pembahasan. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan keterbatasan.

Ciancanelli (2008) menjelaskan universitas ditinjau dari status hukum dan sumber pendanaan terdapat tiga tipe universitas antara lain universitas publik, universitas otonom, dan universitas swasta (korporasi). Universitas publik mengarah pada organisasi yang menjadi bagian dari pemerintah dan didanai dengan pajak yang diperoleh negara. Karakteristik universitas tipe ini adalah bahwa selain dari pendanaan yang dari pemerintah, pegawai adalah berstatus pegawai sipil/ pegawai negeri. Kinerja yang diukur lebih ke *stewardship* yaitu laporan anggaran karena perencanaan dan penganggaran dikendalikan pemerintah. Sebagai bagian dari pemerintah maka uang yang diperoleh dari negara harus dipertanggungjawabkan. Universitas otonom adalah organisasi yang memiliki otonomi secara politik, memiliki struktur administratif yang secara formal independen dari pemerintah. Universitas yang otonom dapat lebih bebas mengelola keuangannya dengan menarik dana selain dari pemerintah namun juga dari pendonor lain sehingga pendanaan lebih membantu meningkatkan kualitas sumber daya universitas. Universitas swasta adalah organisasi yang organisasi bisnis yang secara legal dimiliki oleh entitas swasta yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kekayaan pemilik dan berorientasi

pada laba sebab universitas swasta memiliki kebebasan dalam operasional keuangannya.

Di Indonesia, jenis perguruan tinggi juga seperti halnya diungkapkan oleh Ciancanelli (2008), merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian diubah menjadi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta terbit UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara garis besar perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah dan pelaksanaan otonomi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia, 1989). Berbeda halnya dengan pendidikan dasar (sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas) dikelola dengan sistem sekolah yang lebih sederhana dibandingkan perguruan tinggi. Pemberian otonomi berdampak pada pembiayaan dapat diperoleh dari sumber dana pemerintah, masyarakat, dan dari pendonor swasta dalam negeri atau luar negeri. Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat bersumber dari penerimaan pendidikan, hasil kerjasama, penjualan produk dan jasa universitas, sumbangan atau hibah perorangan atau lembaga. Namun demikian, pemberian otonomi yang diberikan ke universitas negeri tetap menggunakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan) karena termasuk kategori entitas sektor publik.

Otonomi universitas negeri di bidang keuangan mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat. Oleh karena terdapat kemandirian dalam pengelolaan keuangan maka pembukuan keuangan/ pelaporan keuangan wajib diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang independen. Pengelolaan organisasi pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Republik Indonesia, 2003). Konsekuensinya, universitas negeri otonom harus memberikan akuntabilitas laporan keuangan yang dapat diakses dan diketahui oleh publik/masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, tugas utama adalah sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan

Pengabdian kepada Masyarakat). Otonomi pengelolaan dilakukan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi yang dievaluasi secara mandiri oleh perguruan tinggi masing-masing. Ciri khas universitas negeri yang memiliki otonomi penuh (universitas berbadan hukum) adalah antara lain:

- a) Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b) Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c) Unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d) Hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e) Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
- f) Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g) Wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Selain memiliki ciri khas pengelolaan otonomi di atas, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi diberikan oleh Pemerintah Indonesia secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada perguruan tinggi negeri dengan salah satunya membentuk universitas negeri berbadan hukum atau universitas yang otonom dalam pengelolaannya untuk menghasilkan kualitas pendidikan tinggi yang bermutu (Republik Indonesia, 2012).

Lukman *et.al* (2010) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 15 indikator antara lain jumlah paten, pengeluaran dana untuk penelitian, peneliti yang memiliki sitasi tinggi, biaya pengeluaran untuk teknologi informasi dan atau perpusatakaan, rasio mahasiswa terhadap dosen, tingkat lulusan, keberadaan situs *website*, mobilitas, keberlanjutan program dan mata kuliah, pengembangan manajemen dan organisasi, serta keberlanjutan visi dan misi. Diharapkan dengan adanya otonomi yang diberikan pemerintah kepada universitas negeri akan berdampak pada peningkatan investasi penelitian dan menunjang untuk pemerolehan ranking universitas secara institusional di tingkat dunia.

Di sektor swasta, terdapat satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana perguruan tinggi

dapat meminimalkan adanya asimetri informasi dengan memberikan sinyal yang baik kepada pihak luar (Morris 1987). Sinyal yang baik di perguruan tinggi dapat dilihat dari *track record* perguruan tinggi tersebut seperti prestasi perguruan tinggi yang disajikan dalam bentuk ranking universitas. Sinyal-sinyal tersebut dimunculkan oleh perguruan tinggi agar para pemangku kepentingan percaya akan pengelolaan dana di perguruan tinggi dan akan tetap memberikan pendanaan bahkan menambah insentif pendanaan karena prestasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

Jika dikaitkan dengan teori pensinyalan maka perguruan tinggi akan berusaha memberikan sinyal berupa kinerja yang baik kepada pihak luar. Kinerja baik tersebut dapat ditangkap sebagai kabar yang baik bagi pihak-pihak pemangku kepentingan perguruan tinggi tersebut seperti pemerintah, *user* (perusahaan pengguna lulusan), hingga pemangku kepentingan dari luar negeri. Peningkatan kinerja merupakan bagian dari berubahnya status perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang otonom. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi otonom akan lebih leluasa dalam mengelola pendanaan di lingkungan perguruan tinggi tersebut termasuk untuk meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Pengelolaan dana di perguruan tinggi otonom tentu akan berpengaruh dalam hal peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian dikarenakan terdapat banyak pintu pendanaan yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi untuk memperoleh dana. Berdasarkan ulasan di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₁ : Semakin tinggi tingkat otonomi keuangan universitas maka semakin tinggi pengeluaran untuk penelitian

Pemeringkatan universitas merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan (Frenken *et. al.*, 2017). Peringkat universitas merupakan hal penting karena melalui pemeringkatan maka prestasi universitas dapat dibandingkan dengan prestasi universitas lain. Akan tetapi, dalam peningkatan peringkat universitas di tingkat dunia dibutuhkan upaya yang dilakukan universitas untuk memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh lembaga pemeringkat.

Sebagaimana telah didokumentasikan oleh penelitian sebelumnya bahwa peringkat universitas ditentukan oleh berbagai aspek terkait dengan penelitian seperti jumlah penelitian kolaboratif, produktivitas peneliti individu di tingkat universitas, peringkat jurnal universitas, banyaknya artikel yang disitasi (Reddy et. al., 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian merupakan bagian penting untuk mendapatkan peringkat universitas yang tidak dapat diabaikan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sinyal baik yang diterima oleh pemangku kepentingan perguruan tinggi akan berpengaruh pada jumlah penerimaan dana perguruan tinggi tersebut. Apabila perguruan tinggi memiliki banyak pintu penerimaan dana maka alokasi dana penelitian akan diperbesar untuk tujuan peningkatan prestasi perguruan tinggi tersebut. Frenken et.al. (2017) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengindikasikan prestasi penelitian universitas seperti tingginya publikasi yang disitasi, publikasi kolaboratif internasional dan publikasi kolabotif internasional yang bekerjasama dengan industri. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa peningkatan publikasi membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini senada dengan penjelasan Millot (2015) yang menyatakan bahwa untuk melakukan tahapan mulai penelitian hingga publikasi membutuhkan sejumlah biaya tinggi. Dengan demikian, perkembangan penelitian merupakan salah satu bentuk dari investasi yang dilakukan oleh universitas untuk mendapatkan *world ranking* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Pengeluaran penelitian memediasi secara positif hubungan antara otonomi universitas dengan ranking universitas.

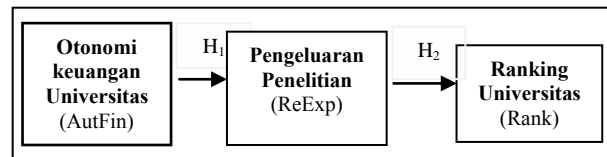
METODE PENELITIAN

Baron dan Kenny (1986) menjelaskan bahwa untuk pengujian mediasi harus memenuhi kondisi yang harus dipenuhi yaitu (1) variabel independen harus mempengaruhi variabel mediasi, (2) variabel independen harus mempengaruhi variabel dependen, dan (3) variabel mediasi harus mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat 3 model regresi yang digunakan adalah:

- (1) $ReExp = \alpha_0 + \beta_1 AutFin + \varepsilon$
- (2) $Rank = \alpha_0 + \beta_1 AutFin + \varepsilon$
- (3) $Rank = \alpha_0 + \beta_1 AutFin + \beta_2 ReExp + \varepsilon$

Keterangan:
 Rank= Ranking universitas
 AutoFin= Otonomi keuangan universitas
 ReExp = Pengeluaran penelitian
 ε = Error term
 Berikut ini merupakan gambar model penelitian ini:



Gambar 2. Model Penelitian

Ranking universitas dapat ditentukan oleh jumlah penelitian kolaboratif, produktivitas peneliti individu di tingkat universitas, peringkat jurnal universitas, banyaknya artikel yang disitasi (Reddy et. al., 2016). Variabel dependen adalah ranking universitas (Rank) diukur dari jumlah penelitian yang terindeks Scopus. Sedangkan variabel independen terdiri dari:

- a. Otonomi Keuangan Universitas
 Otonomi keuangan universitas dalam penelitian ini diidentifikasi dari rasio jumlah penerimaan non-pemerintah dibandingkan jumlah penerimaan keseluruhan universitas. Semakin besar rasio jumlah penerimaan non- pemerintah terhadap total penerimaan maka semakin besar tingkat otonomi keuangan universitas.
- b. Pengeluaran penelitian
 Data ini diperoleh dari laporan keuangan berupa data beban penelitian. Ranking universitas tingkat dunia dari *Times Higher Education (THE) World University Rankings* dan *the Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings* menunjukkan jika komponen penelitian berperan 6 % untuk indikator di THE (Pavel, 2015; Olcay dan Bulu, 2017). Lukman et.al (2010) salah satu faktor yang menentukan ranking universitas adalah beban

penelitian yang dikeluarkan universitas. Perhitungan pengeluaran penelitian dari logaritma natural (ln) nilai pengeluaran penelitian.

Pemilihan data penelitian dengan metode *purposive random sampling*, diperoleh 10 besar (*top ten*) universitas berdasarkan jumlah artikel penelitian yang terindeks scopus di <http://sinta2.ristekdikti.go.id>, dengan rincian Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Sumatera Utara (USU).

Sedangkan, alat statistik yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi dengan variabel mediasi (Baron dan Kenny, 1986). Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan statistik jika analisis data memiliki lebih dari satu variabel. Uji asumsi yang harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas (Olobatuyi, 2006). Selain itu dilakukan uji heterokesdatisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerolehan laporan keuangan diperoleh dari *website* resmi universitas dan permintaan data secara tertulis ke Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas yang menjadi sampel penelitian. Ketidakterediaan laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik melalui *website* resmi universitas diperlukan perlakuan khusus dengan meminta data tersebut dengan surat formal yang ditujukan ke Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan data jumlah penelitian yang terindeks scopus diperoleh dari *website* www.scopus.com. Data untuk investasi yang dikeluarkan untuk membiayai penelitian diperoleh dari informasi yang tertuang dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta laporan tahunan universitas, dan informasi relevan yang diperoleh dari *website* resmi yang diumumkan oleh universitas.

Berdasarkan pemerolehan data laporan keuangan, universitas yang memberikan laporan keuangan secara lengkap adalah:

Tabel 1. Sampel Universitas dengan Ketersediaan Data Lengkap

| No | Universitas |
|----|----------------------------------|
| 1 | Universitas Indonesia (UI) |
| 2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
| 3 | Universitas Brawijaya (UB) |
| 4 | Universitas Padjajaran (Unpad) |
| 5 | Universitas Sumatera Utara (USU) |

Total observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 35 observasi dengan rincian data dari 5 universitas selama periode 7 tahun dari 2010-2016. Ringkasan sampel yang dilakukan observasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Pengumpulan Sampel Penelitian

| | |
|---|-----------------------------|
| Jumlah populasi berdasar kriteria | 10 universitas |
| Jumlah laporan keuangan universitas yang terkumpul secara lengkap | 5 universitas |
| Jumlah observasi Periode observasi 7 tahun (2010-2016) | 5 x 7 tahun 35 observasi |

Tabel 3. Statistik Deskriptif

| Variabel | Max | Min | Mean |
|---|--------------|----------------|---------------|
| Total Pendapatan Universitas | Rp621 Miliar | Rp2,45 Triliun | Rp1,3 Triliun |
| Pendapatan Non-Pemerintah | Rp294 Miliar | Rp1,68 Triliun | Rp855 Miliar |
| Pengeluaran Penelitian | Rp2,9 Miliar | Rp165 Miliar | Rp49 Miliar |
| Otonomi Keuangan Universitas | 0,41 | 0,82 | 0,62 |
| Ranking Universitas (Jumlah Publikasi terindeks scopus) | 18 | 1.092 | 298 |

Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa pendapatan universitas negeri secara total yang terdiri dari pendapatan pemerintah dan non-pemerintah paling kecil Rp621 Miliar, maksimum Rp2,45 Triliun. Sedangkan rata-rata total pendapatan universitas negeri adalah Rp1,3 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa universitas negeri memiliki penerimaan yang cukup besar

karena rata-rata sudah melebihi Rp1 Triliun selama tujuh tahun. Pendapatan non-pemerintah yang mengindikasikan sejauh mana universitas dapat memperoleh pendapatan diluar bantuan pemerintah rata-rata sebesar Rp855 Miliar. Pendapatan non-pemerintah yang diperoleh universitas negeri adalah diantaranya pendapatan dari mahasiswa, pendapatan pelatihan, penjualan jasa dan produk universitas. Otonomi keuangan universitas negeri paling rendah sebesar 41% (0,41), tertinggi 0,82 (82%), dan rata-rata 0,62 (62%). Hal ini berarti bahwa universitas negeri berbadan hukum dan badan layanan umum memiliki rasio otonomi keuangan di atas 50% yaitu rata-rata 62%. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sumber dana penerimaan universitas negeri yang otonom dan dapat menjalankan usaha serta memperoleh kemandirian dalam pengelolaan keuangan sehingga pendapatan non-pemerintah memiliki rasio yang lebih tinggi daripada pendapatan pemerintah dibandingkan dengan total pendapatan universitas negeri.

Ranking universitas negeri yang diprosikan dengan jumlah penelitian/artikel publikasi yang terindeks Scopus memiliki nilai terendah 18, tertinggi 1.092, dan rata-rata 298. Hal ini menunjukkan bahwa selama 7 tahun dari periode 2010 – 2016, rata-rata publikasi internasional yang terindeks Scopus adalah 298.

Tahapan – tahapan dalam penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan pengujian. Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, penelitian ini telah dilakukan uji asumsi klasik sebagai uji prasyarat untuk menghasilkan model baik dan dapat diambil simpulan statistik yang dapat diandalkan. Uji prasyarat yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Berdasarkan uji prasyarat yang telah dilakukan, diketahui bahwa model yang dibangun telah memenuhi dan dapat dilanjutkan untuk pengujian lebih lanjut.

Setelah model terbebas dari permasalahan autokorelasi, multikolineritas, dan heterokesdasititas, serta sudah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah melakukan pengujian analisis regresi dengan menggunakan variabel mediasi.

Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H₁)

$$ReInv = \alpha_0 + \beta_1 AutFin + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Tabel 4. Ringkasan Uji Model 1

| | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-------|-------|
| R | | R Square (R ²) | | |
| 0,6476 | | 0,419 | | |
| Variabel | Koefisien | SE | T | p |
| Konstanta (α ₀) | 19,12 | 1,02 | 18,65 | 0,000 |
| Otonomi Keuangan Universitas (AutFin) | 7,95 | 1,62 | 4,88 | 0,000 |
| Variabel dependen= Pengeluaran Penelitian (ReExp) | | | | |

Tabel 4. ringkasan uji model 1 menunjukkan bahwa kontribusi variabel otonomi keuangan universitas berperan 41,9% terhadap pengeluaran investasi penelitian yang diberikan universitas kepada civitas akademika. Hasil pengujian persamaan model 1 di atas menunjukkan bahwa H₁ diterima dengan nilai signifikansi 0,000 (p-value 5%). Hal ini berarti otonomi keuangan universitas secara signifikan berpengaruh pada pengeluaran penelitian universitas. Semakin tinggi jumlah dana non-pemerintah yang dimiliki universitas berdampak positif pada peningkatan nilai pengeluaran untuk kegiatan penelitian.

Hasil pengujian jalur persamaan model 2

$$Rank = \alpha_0 + \beta_1 AutFin + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Tabel 5. Ringkasan Uji Model 2

| | | | | |
|---|-----------|----------------------------|-------|------|
| R | | R Square (R ²) | | |
| 0,53 | | 0,28 | | |
| Variabel | Koefisien | SE | T | p |
| Konstanta (α ₀) | -664 | 269 | -2,46 | 0,01 |
| Otonomi Keuangan Universitas (AutFin) | 1.547 | 428 | 3,60 | 0,00 |
| Variabel dependen= Ranking Universitas (Rank) | | | | |

Tabel 5. ringkasan uji model 2 menunjukkan bahwa model dapat menunjukkan bahwa kontribusi variabel otonomi keuangan universitas berperan 28% terhadap ranking universitas yang diprosikan dengan jumlah penelitian yang terindeks Scopus. Hasil

pengujian persamaan model 2 di atas menunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 (*p-value* 5%) berarti otonomi keuangan universitas secara signifikan berpengaruh pada ranking universitas. Semakin tinggi jumlah dana non-pemerintah yang dimiliki universitas berdampak positif pada peningkatan jumlah publikasi penelitian yang terindeks scopus yang secara langsung berdampak pada peningkatan ranking universitas.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

$$\text{Rank} = \alpha_0 + \beta_1 \text{AutFin} + \beta_2 \text{ReInv} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Tabel 6. Ringkasan Uji Model 3

| | R | R Square (R ²) | | |
|--|------|----------------------------|--|--|
| | 0,64 | 0,414 | | |

| Variabel | Koefisien | SE | t | p |
|--|-----------|-----|-------|-------|
| Konstanta (α_0) | -2819 | 840 | -3,35 | 0,002 |
| Otonomi Keuangan Universitas (AutFin) | 650 | 516 | 1,26 | 0,216 |
| Pengeluaran Penelitian (ReExp) | 112 | 42 | 2,68 | 0,011 |

Variabel dependen= Ranking Universitas (**Rank**)

Hasil analisis efek mediasi

Tabel 6 ringkasan uji model 3 dapat menunjukkan bahwa secara simultan variabel otonomi keuangan universitas dan pengeluaran investasi penelitian dapat berkontribusi 41% terhadap Ranking Universitas. Dari pengujian model 1, 2, dan 3 di atas persamaan model regresi tersebut memenuhi kriteria pengujian variabel mediasi sesuai dari Baron dan Kenny (1986) dengan penjelasan:

1. Persamaan model 1 (menguji variabel independen ke variabel mediasi)
Diperoleh hasil bahwa tingkat otonomi keuangan universitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran investasi penelitian di universitas dengan *p-value*= 0,000. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah pendapatan non-pemerintah yang dimiliki universitas menunjukkan semakin tinggi pula nilai pengeluaran investasi penelitian yang diberikan universitas sehingga (H₁) diterima.

2. Persamaan model 2 (menguji variabel independen ke variabel dependen)
Diperoleh hasil bahwa otonomi keuangan universitas secara signifikan terhadap ranking universitas dengan *p-value*= 0,001. Hal ini berarti bahwa semakin universitas memiliki keuangan yang otonom dengan lebih banyak memiliki pendapatan di luar pemerintah maka berpengaruh positif atas meningkatnya ranking universitas ditinjau dari jumlahnya publikasi penelitian yang terindeks Scopus.
3. Persamaan model 3 (menguji variabel mediasi ke variabel dependen).

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien variabel otonomi universitas yang pada awalnya berpengaruh signifikan terhadap ranking universitas menjadi tidak signifikan (*p*=0.216) apabila terdapat variabel pengeluaran investasi penelitian (*p*=0.011). Mendasarkan pada teknik Baron dan Kenny (1986) terdapat beberapa tahapan untuk mengetahui adanya efek mediasi. Pertama, pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen harus signifikan. Kedua, pengaruh antara variabel mediasi terhadap variabel dependen harus signifikan. Ketiga, koefisien dari pengaruh independen terhadap dependen setelah adanya variabel mediasi menjadi tidak signifikan, maka ditemukan adanya peran variabel mediasi penuh. Sementara, apabila hanya terjadi penurunan koefisien dari pengaruh independen terhadap dependen setelah adanya variabel mediasi, maka ditemukan efek mediasi parsial. Dengan demikian, mendasarkan teknik Baron dan Kenny (1986) tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran investasi penelitian memediasi penuh pengaruh antara otonomi universitas terhadap ranking universitas. Hal ini berarti bahwa tingkat otonomi universitas dapat mendorong besarnya tingkat pengeluaran investasi penelitian. Besarnya tingkat pengeluaran investasi penelitian berdampak pada peningkatan kuantitas publikasi yang dimiliki universitas sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ranking universitas.

Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa ranking universitas dapat dipengaruhi oleh hubungan positif antara otonomi keuangan universitas dengan pengeluaran penelitian. Hal ini

sejalan dengan penelitian sebelumnya Reddy *et.al* (2016) dan Frenken *et.al.* (2017). Penelitian ini juga mengonfirmasi adanya teori pensinyalan yang secara implisit diterapkan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan berusaha memberikan sinyal yang baik berupa kinerja yang baik khususnya oleh perguruan tinggi yang memiliki otonomi keuangan. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi akan memiliki kewenangan atas pengelolaan dana dan berakibat pada jumlah alokasi dana penelitian.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dorongan untuk peningkatan publikasi penelitian memerlukan biaya yang tinggi sehingga otonomi keuangan universitas dapat menjadi bagian dalam pemerolehan pendapatan universitas yang lebih luas dan harapannya dapat meningkatkan alokasi pengeluaran penelitian yang berujung pada publikasi penelitian dan ranking universitas. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi penelitian ini akan juga berpengaruh pada ranking universitas yang mana akan meningkatkan reputasi universitas tersebut. Pengaruh tersebut juga akan kembali memengaruhi prestasi perguruan tinggi dan kembali menjadikan sinyal yang baik pada pihak di luar perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Tingkat rata-rata otonomi keuangan universitas adalah 62% yang berarti bahwa jumlah pendapatan universitas yang berasal dari non-pemerintah lebih besar dari pendapatan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa universitas negeri yang otonom baik yang berbadan hukum dan badan layanan umum dapat berhasil membuktikan jika kemandirian pengelolaan keuangan dapat mendorong peningkatan pendapatan non-pemerintah. Selanjutnya hal tersebut berdampak positif pada peningkatan jumlah beban penelitian yang dikeluarkan oleh universitas negeri. Hal ini ditunjukkan pada hasil penelitian ini bahwa otonomi keuangan universitas berpengaruh positif terhadap ranking pada level 1% dan pengeluaran penelitian terhadap ranking universitas pada level 5%.

Otonomi keuangan universitas negeri yang ditunjukkan dengan rasio pendapatan non-pemerintah terhadap total pendapatan universitas, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

pengeluaran penelitian universitas negeri. Semakin tinggi penerimaan non-pemerintah yang dimiliki universitas negeri semakin tinggi pula pengeluaran penelitian. Universitas negeri otonom cenderung memiliki kewenangan atas pengelolaan pendapatan yang diterima dari non-pemerintah untuk dialokasikan ke pengeluaran investasi penelitian. Pengeluaran penelitian tersebut dapat berpengaruh positif signifikan terhadap ranking universitas dengan semakin meningkatnya jumlah publikasi penelitian yang terindeks scopus.

Pengeluaran penelitian dapat memediasi penuh (*full mediating*) hubungan antara otonomi keuangan universitas terhadap ranking universitas. Hal ini menunjukkan bahwa universitas yang otonom dalam pengelolaan keuangan dapat memperoleh pendapatan lebih (meningkat) sehingga terjadi peningkatan pengeluaran riset serta dapat berdampak positif pada peningkatan jumlah publikasi penelitian yang terindeks scopus. Jumlah publikasi penelitian yang terindeks scopus menjadi bagian dari pemeringkatan ranking universitas. Semakin tinggi jumlah penelitian yang terindeks internasional semakin tinggi pula ranking universitas di tingkat dunia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni, belum dilakukan pengujian uji beda atas perbedaan status universitas. Perbedaan universitas yang pengelolaan otonomi penuh berstatus universitas negeri berbadan hukum dan universitas negeri badan layanan umum. Selain itu, data penelitian yang digunakan hanya terbatas pada 5 (lima) universitas negeri di Indonesia sehingga tidak dapat diambil simpulan secara umum. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian uji beda antara universitas memiliki otonomi penuh yaitu universitas negeri badan hukum dengan universitas badan layanan umum. Ranking universitas dapat menggunakan proksi yang lain di luar jumlah penelitian yang terindeks internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselenggara karena hibah penelitian yang diberikan universitas. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan hibah penelitian yang diberikan oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Kepada mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis (Hendra, Yoga, Nurma, Putri) diucapkan terima kasih atas dukungan membantu dalam pemerolehan data. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini kami ucapkan terima kasih (Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Brawijaya) untuk kepercayaannya memberikan laporan keuangan dan data yang relevan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R.M. dan Kenny, D.A. 1986. *The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations.* *Journal of Personality and Social Psychology*: 1173-1182
- Ciancanelli, Penny. 2008. *The business of teaching and learning: an accounting perspective.* *Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences*: 153-185.
- Daraio, Cinzia, Andrea Bonaccorsi, dan Léopold Simar. 2015. "Rankings and University Performance: A Conditional Multidimensional Approach." *European Journal of Operational Research*: 918–30.
- Frenken, Koen., Gaston J. Heimeriks, dan Jarno Hoekman. 2017. "What Drives University Research Performance? An Analysis Using the CWTS Leiden Ranking Data." *Journal of Informetrics* 11: 859–872.
- Hemsley-Brown, Jane, T.C. Melewar, Bang Nguyen, dan Elizabeth J. Wilson. 2016. "Exploring Brand Identity, Meaning, Image, and Reputation (BIMIR) in Higher Education: A Special Section." *Journal of Business Research*: 3019–22.
- Jöns, Heike, dan Michael Hoyler. 2013. "Global Geographies of Higher Education: The Perspective of World University Rankings." *Geoforum*: 45–59.
- Lukman, R., D. Krajnc, dan P. Glavic. 2010. "University ranking using research, educational, dan environmental indicators". *Journal of Cleaner Production*: 619-628
- Millot, Benoit. 2015. "International Rankings: Universities vs. Higher Education Systems." *International Journal of Educational Development*: 156–65.
- Morris, R. D. 1987. "Signaling, Agency Theory and Accounting Policy Choice." *Accounting and Business Research*: 47–56.
- Olcay, G.A., dan Bulu, M. 2017. *Is measuring the knowledge creation of universities possible?: a review of university ranking.* *Technological Forecasting and Social Change*: 153-160.
- Olobatuyi, Moses E. 2006. *A User's Guide to Path Analysis.* Lanham, Maryland: University Press of America Inc.
- Pavel, A.P. 2015. *Global university rankings - a comparative analysis. 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM.* *Procedia Economics and Finance*: 54-63
- Reddy, K.S., En Xie, dan Qingqing Tang. 2016. "Higher Education, High-Impact Research, and World University Rankings: A Case of India and Comparison with China." *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*: 1–21.
- Republik Indonesia. 1989. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.* Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wicaksono, Teguh Yudo dan Deni Friawan. 2011. *Chapter Recent Developments in Higher Education in Indonesia: Issues and challenges in Book titled Financing Higher Education and Economics Development in East Asia.* ANU Press
- Wilkins, Stephen, dan Jeroen Huisman. 2012. "UK business school rankings over the last 30 years (1980–2010): Trends and explanations." *Higher Education*: 367–382.